

**PERUNTUKAN WILAYAH KAWASAN WISATA
PANTAI PURUS KOTA PADANG**

**(Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan
Kawasan Wisata Pantai)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNP
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

**IQBAL MONADI
2006/73353**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Peruntukan Wilayah Kawasan Wisata Pantai Purus Kota
Padang (Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai)

Nama : Iqbal Monadi

NIM : 2006/73353

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 28 Januari 2011

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Nurman S, M.Si
Nip.195904091985031002

Drs.Syamsir, M.Si
Nip.196304011989031003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan
Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Jumat 21 Januari 2011 pukul 09.00 s/d 10.00 WIB

Peruntukan Wilayah Kawasan Wisata Pantai Purus Kota Padang (Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai)

Nama : Iqbal Monadi
NIM : 2006/73353
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 28 Januari 2011

Tim Penguji:

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Drs. Nurman S, M.Si	_____
2. Sekretaris	: Drs. Syamsir, M.Si	_____
3. Anggota	: Dra. Runi Hariantati, M.Hum	_____
4. Anggota	: Drs. Ideal Putra, M.Si	_____
5. Anggota	: Estika Sari, SH	_____

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA.
NIP.196107201986021001

ABSTRAK

Iqbal Monadi: NIM 2006/73353. Peruntukan Wilayah Kawasan Wisata Pantai Purus Kota Padang(Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai)

Peruntukan kawasan wisata di sepanjang Pantai Padang berdasarkan atas perda No.10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang, namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan seperti kurangnya sarana prasarana pariwisata di Pantai Purus serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Pantai Purus baik itu partisipasi dalam pengelolaan kebersihan pantai, kemandirian pantai dan ketertiban pantai.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan cara *Snowball sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumenter. Teknik analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi dan data dianalisis dengan langkah sebagai berikut pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan /verifikasi data.

Penelitian menunjukkan bahwa peruntukan Pantai Purus sebagai suatu kawasan dilihat dari kriteria kelayakan suatu wilayah menjadi kawasan wisata yang mencakup sarana prasarana , ada beberapa kriteria yang tidak di terpenuhi oleh pantai purus seperti, belum adanya petugas pariwisata yang menjaga kawasan wisata, tidak tersedianya fasilitas parkir yang layak, tidak adanya sarana ibadah, serta belum tertatanya pedagang yang berjualan di pantai purus. Dari segi partisipasi masyarakat terhadap lingkungan pantai terlihat masih rendah, hal ini dapat diketahui dari masih banyaknya sampah yang bertebaran di sekitar pantai. Dari segi ketertiban partisipasi pedagang Pantai Purus yang masih rendah dan bersifat pasif karena masih banyak pedagang yang melanggar ketertiban, seperti berjualan diluar jam yang ditentukan dibudpar, menggunakan payung pengunjung ketika berjualan di malam hari, bahkan ada yang menggunakan payung yang sangat rendah dan menutupi badan pengunjung. Dari segi keamanan, pantai purus belum memiliki petugas keamanan seperti polisi wisata, namun partisipasi aktif pedagang yang membentuk suatu forum komunikasi Pedagang Pantai Purus Baru (FKPPPB), membuat keamanan di sekitar objek wisata Pantai Purus dapat terjaga dengan baik.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peruntukan kawasan wisata Pantai Purus sebagai suatu kawasan wisata masih terkendala kurangnya sarana prasarana kepariwisataan, serta bentuk partisipasi yang pasif dari masyarakat menyebabkan pengelolaan Pantai Purus sebagai suatu kawasan wisata tidak terlaksana dengan baik. Oleh karena itu untuk menjadikan pantai Purus sebagai suatu kawasan wisata yang diminati oleh banyak pengunjung, pemerintah harus lebih meningkatkan kelengkapan sarana prasarana pariwisata serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar atau pedagang untuk menjaga dan mengelola kawasan wisata dengan baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peruntukan Wilayah Kawasan Wisata Pantai Purus Kota Padang (Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai)”**. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan ilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs.Nurman S, M.Si selaku pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Drs.Syamsir, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, informasi, dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

3. Ibu Dra.Runi Hariantati M.Hum, Bapak Drs. Ideal Putra, M.Si , Ibu Estika Sari, SH selaku tim penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Kepala Bidang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang, Bapak Kasi Objek dan Sarana Dibudpar Kota Padang, Bapak Kasi Perijinaan dan Pembinaan Sarana Wisata Dibudpar Kota Padang, Bapak Kasi Perencanaan Ruang Kota Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang.
5. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
6. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si dan Dra. Aina selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik.
7. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Bapak dan Ibu Dosen program studi Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan yang bernilai.
9. Teristimewa untuk kedua orang tuaku: Papa Drs.Darman Sinapa dan Mama Dra.Adriati Taher serta adik-adik ku dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berprestasi dan dengan doa, semangat, serta dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

10. Seluruh teman-teman program studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2006, yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas segala kebaikannya terutama bagi teman-temanku tercinta IAN R 06.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan perhatian yang telah diberikan untuk penulis selama ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, November 2010

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah	5
1. Identifikasi Masalah	5
2. Pembatasan Masalah	6
3. Perumusan masalah	6
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
1. Secara Teoritis	7
2. Secara Praktis	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis	
1. Rencana Tata Ruang Kota Padang	9
2. Konsep Pariwisata	
a. Definisi Pariwisata	16
b. Pelaku Pariwisata	17
3. Konsep Partisipasi	
a. Definisi Partisipasi	24
b. Bentuk-bentuk Partisipasi	26
4. Sapta Pesona	28
a. Keamanan	28
b. Ketertiban	28
c. Kebersihan	29
d. Kesejukan	29
e. Keindahan	30
f. Keramahan	30

g. Kenangan	31
5. Konsep Kebersihan Lingkungan	31
6. Pendekatan Topdown dan Bottom Up	33
B. Kerangka Konseptual	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Informan Penelitian	36
D. Jenis, dan Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Uji Keabsahan Data	40
F. Teknik Analisis Data	42
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
2. Gambaran Umum Kawasan Objek Wisata Pantai Purus	48
3. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang	50
4. Gambaran Umum Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang	52
5. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang	53
B. Temuan Khusus	
1. Peruntukan Kawasan Wisata Pantai Purus	55
2. Sarana Prasana Pariwisata	58
3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Pantai ..	68
a. Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Keamanan Pantai Purus	68
b. Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban Pantai Purus	71
c. Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Kebersihan	

Pantai Purus	74
C. Pembahasan	
1. Peruntukan Kawasan Wisata Pantai Purus	79
2. Kelengkapan Sarana-prasarana.....	80
3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Pantai	
a.Keamanan	86
b.Ketertiban	88
c.Kebersihan	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	

91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.Tabel II.1 Kelayakan Wilayah Menjadi Suatu Objek Wisata.....	22
2.Tabel IV.1 Jumlah Pedagang di Kawasan Objek Wisata Pantai Purus Padang	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : Kerangka Konseptual	32
Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang	51
Gambar IV.2 : Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang.....	52
Gambar IV.3 : Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.....	54
Gambar IV.4 : Prasarana jalan di Pantai Purus	58
Gambar IV.5 : Taman rekreasi di Pantai Purus	59
Gambar IV.6 : Kios pedagang di Pantai Purus	63
Gambar IV.7 : Aktifitas Surfing di Pantai Purus	64
Gambar IV.8 : Kios Pedagang Pantai Purus dimalam hari	66
Gambar IV.9 : Fasilitas WC di Pantai Purus	66
Gambar IV.10 : Mesjid Al-Kamil	67
Gambar IV.11 : Lapangan parkir di Pantai Purus	67
Gambar IV.12 : Bak Penampungan Sampah	75
Gambar IV.13 : Tumpukan sampah di Pantai Purus	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Padang sebagai kota terbesar dipesisir barat pantai Sumatera merupakan kota yang memiliki daya tarik dan keunikan tertentu sebagai daerah tujuan wisata. Keunikan dan daya tarik Kota Padang salah satunya terletak pada keindahan alam dan budaya yang dimiliki, sehingga berpotensi menjadi daerah tujuan wisata di Indonesia. Potensi wisata yang ada terutama dari keindahan alam Kota Padang merupakan nilai jual tersendiri untuk dijadikan objek wisata alam dan aset terpenting dalam menambah pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal. Pemerintah Kota Padang memiliki peran dan tanggung jawab memajukan dan mengembangkan potensi pariwisata di Kota Padang. Pemerintah daerah merupakan pelaku yang tidak kalah pentingnya dalam pengaturan, penyediaan, perlindungan promosi dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata (Janiatan D. dan Helmut F.W, 2006:23).

Objek wisata alam Kota Padang lebih didominasi oleh wisata pantai karena Kota Padang memiliki garis pantai yang cukup panjang yaitu 68,126 km. Pada umumnya kondisi pantai cukup bersih dengan pasir yang putih dan landai, sehingga berpotensi untuk dijadikan objek wisata pantai (Sriyanti

Yazid, 2008:11). Adapun objek wisata pantai di Kota Padang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel I.1
Objek Wisata Pantai di Kota Padang

No	Objek Wisata	Lokasi	Ket
1	Pantai Air Manis	Padang Selatan	
2	Pantai Padang	Padang Barat	
3.	Pantai Purus	Padang Barat	
4	Pantai Pasir Jambak	Koto Tengah	
5	Pantai Pasie Sabalah	Koto Tengah	

Sumber : RIPDA Kota Padang 2008-2017

Wisata pantai merupakan suatu bentuk wisata potensial, perencanaan dan pengelolaan pariwisata pantai yang baik dan tepat akan membuat kawasan wisata pantai tersebut berkembang, sehingga manfaat keberadaannya dapat dirasakan baik oleh pemerintah daerah, pengelola wisata, maupun penduduk setempat. Manfaat yang didapat selain manfaat ekonomi (menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan penduduk lokal, pemasukan bagi pemerintah daerah), juga manfaat lain berupa manfaat konservasi, seperti keberagaman mahluk hidup, perlindungan sumber air, filter polusi, dan lain-lain. Whelan dalam Tri Sulastri (2004:31) .

Berdasarkan perda Kota Padang No.10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Padang pada pasal 83 dikatakan bahwa pengembangan kawasan wisata alam di kota Padang

meliputi kawasan wisata pantai disepanjang Pantai Padang dan Pantai Purus merupakan lanjutan dari pengembangan objek wisata Pantai Padang yang telah dibangun beberapa waktu yang lalu, yang nantinya secara bertahap akan dilengkapi dengan fasilitas seperti perdagangan dan komersil, hunian, pelayanan social, fasilitas pariwisata seperti jetsky, selancar, volley pantai dan pertunjukan budaya nelayan.

Dijadikan nya Pantai Purus sebagai objek wisata pantai di Kota Padang merupakan bentuk pendekatan *Top down* dari perencanaan pembangunan Kota Padang. Peruntukan sebagai suatu kawasan wisata di Pantai Purus sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat yang tinggal disepanjang pantai, dengan dibangunnya jalan permanen menuju Pantai Purus oleh pemerintah mengakibatkan aktifitas masyarakat ke daerah Purus semakin banyak sehingga banyak dari masyarakat disekitar pantai menggunakan lahan disekitar bibir pantai sebagai tempat mengais rezeki mereka dengan cara membangun warung-warung untuk menjual makanan dan minuman.

Peruntukan kawasan Purus sebagai pantai wisata masih banyak memiliki permasalahan seperti pembangunan kios-kios tempat berjualan masyarakat setempat yang tidak tertata dengan rapi dikarenakan tidak adanya bantuan pemerintah dalam penataan kios-kios disekitar pantai tersebut. Kurangnya sarana prasarana pariwisata di kawasan wisata Pantai Purus Kota Padang, tidak tertatanya tempat parkir di kawasan wisata Pantai Purus Kota Padang, kurangnya fasilitas kebersihan seperti bak penampungan sampah di

kawasan wisata Pantai Purus Kota Padang, kurangnya terjaganya keamanan pengunjung di kawasan wisata Pantai Purus, dan kurangnya ketertiban pedagang di kawasan wisata Pantai Purus Kota Padang

Dari observasi awal yang peneliti lakukan di Kantor Kelurahan Purus terdapat 85 orang masyarakat setempat yang berjualan di kawasan Pantai Purus Padang. Banyaknya pedagang di kawasan Pantai Purus Padang memberikan dampak yang tidak baik dari sisi kebersihan di Pantai Purus, karena aktifitas perdagangan disekitar pantai megakibatkan lingkungan sekitar pantai menjadi kotor, banyak pedagang yang berjualan disekitar pantai membuang sisa dagangannya ke tepi pantai sehingga mengakibatkan kebersihan pantai tidak terjaga dengan baik Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Sastra Tando(27/7/2010), seorang pedagang yang berjualan di kawasan Pantai Purus yang menyatakan bahwa

“Banyak dari kami yang membuang sisa jualan ke pinggir laut karena tidak ada tempat pembuangan sampah yang disediakan di sekitar sini, adapun tempat pembuangan sampah letaknya jauh dari tempat kami berjualan”.

Berbagai gambaran kondisi di sekitar Pantai Purus tersebut diakibatkan tindakan yang tidak memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan dengan membiarkan sampah berserakan di sekitar kawasan pantai bahkan membuang sampah ke laut. Keadaan tersebut tentunya menciptakan kondisi lingkungan yang tidak bersih dan dapat mencemari lingkungan sekitarnya yang tentunya membawa dampak tersendiri bagi keberadaan lokasi tersebut. Apabila hal tersebut tidak ditanggulangi akan

menyebabkan turunnya minat masyarakat dan wisatawan berkunjung ke lokasi tersebut.

Dalam upaya menciptakan suatu lingkungan yang bersih dan sehat dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya peruntukan wilayah kawasan wisata Pantai Purus dilakukan dengan pendekatan *Bottom up* yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan lingkungan pariwisata.

Berdasarkan hal diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelusuran secara ilmiah dengan mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian dengan judul penelitian "**Peruntukan Wilayah Kawasan Wisata Pantai Purus Kota Padang (Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai)**".

B. Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, selanjutnya penulis mencoba mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya sarana prasarana pariwisata di kawasan wisata Pantai Purus Kota Padang.
- b. Kurangnya keteraturan kios-kios tempat berjualan di sekitar kawasan wisata Pantai Purus Kota Padang.

- c. Tidak tertatanya tempat parkir di kawasan wisata Pantai Purus Kota Padang.
- d. Kurangnya fasilitas kebersihan seperti bak penampungan sampah di kawasan wisata Pantai Purus Kota Padang.
- e. Kurangnya terjaganya keamanan pengunjung di kawasan wisata Pantai Purus.
- f. Kurangnya ketertiban pedagang di kawasan wisata Pantai Purus Kota Padang

2. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis dan untuk mempertajam pembahasan masalah maka perlu dilakukan pembatasan masalah yaitu penelitian ini membahas tentang peruntukan Pantai Purus Kota Padang sebagai kawasan wisata , bagaimana sarana prasarana kepariwisataan di Pantai Purus serta partisipasi masyarakat setempat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan, keamanan dan ketertiban di kawasan wisata Pantai Purus Kota Padang.

3. Perumusan masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Kelengkapan sarana prasarana pariwisata di kawasan wisata Pantai Purus Kota Padang?
- b. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata Pantai Purus dilihat dari aspek kebersihan, keamanan dan ketertiban?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terfokus dan dengan adanya keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki, dan untuk mempertajam objek pembahasan, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tentang kelengkapan sarana prasarana kepariwisataan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata pantai yang meliputi , kebersihan dikawasan wisata Pantai Purus, keamanan dan ketertiban dikawasan wisata Pantai Purus.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui kelengkapan sarana prasarana pariwisata di kawasan wisata Pantai Purus Kota Padang
2. Mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata Pantai Purus yang dilihat dari aspek kebersihan, keamanan dan ketertibannya.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan peruntukan wilayah kawasan wisata Pantai Purus Kota Padang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kota Padang, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kota Padang didalam pengelolaan Pantai Purus sebagai objek wisata pantai di Kota Padang.
- b. Bagi penulis Penulis dapat mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata Pantai Purus Kota Padang.
- c. Sebagai masukan bagi peneliti lanjutan yang ada hubungannya dengan Peruntukan Wilayah Kawasan Wisata Pantai Purus Kota Padang

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A.Kajian Teoritis

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No.10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang, pada Bab II tentang azas penataan ruang kota dinyatakan bahwa RTRWK didasarkan atas 4 azas yaitu:

- Manfaat, yaitu menjadikan kota madani melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam pelayanan kegiatan pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan, perdagangan, jasa dan transportasi.
- Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang
- Kelestarian yaitu, menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang.
- Keterbukaan bahwa setiap orang /pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang

Dalam RTRW kota padang ini lingkup wilayah perencanaan tata ruang kota Padang adalah seluas 694,96 Ha wilayah darat dan 720 Ha wilayah laut yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan.

a. Strategi Penataan Ruang Kota

Pada pasal 7 dinyatakan bahwa strategi pengembangan pusat kota yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan yang merata diseluruh wilayah kota sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya yang meliputi:

- 1) Pemisahan pusat pelayanan kota dengan pusat pelayanan regional pada ruang-ruang yang aman terhadap ancaman bencana dan mengintegrasikan dengan pengembangan wilayah sector Kota Padang
- 2) Mengembangkan pusat kota di utara, timur , selatan dan tengah kota dengan skala pelayanan kota sebagai penggerak pertumbuhan kota berbasis mitigasi bencana
- 3) Mengembangkan sub pusat kota disesuaikan dengan kecendrungan perkembangan dan skenario pengembangan kota dan wilayah pelayanannya sampai dengan akhir tahun perencanaan.
- 4) Menetapkan wilayah pengembangan sesuai dengan kesatuan fungsional pengembangan dan wilayah pelayanannya dengan menekankan pada fungsi tertentu yang secara keseluruhan dapat menunjang tujuan tata ruang kota wilayah Padang.

b. Rencana Penetapan Wilayah Pengembangan

Berdasarkan kepada pasal 7 huruf d dalam perda no.10 Tahun 2005 dinyatakan bahwa :

- 1) Wilayah pengembangan I mencakup Kecamatan Padang Barat, Kec.Padang Timur, Kec.Padang Utara dan Kec.Nanggalo dengan luas 31,30 km², diarahkan untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, skala lokal, regional, dan internasional, permukiman perkotaan dengan kepadatan sedang sampai tinggi serta kegiatan wisata bahari , wisata budaya dan wisata belanja
- 2) Wilayah pengembangan II mencakup wilayah Kec.Padang Selatan, Kec.Lubuk Begalung dengan luas 40,94 km², diarahkan untuk pengembangan transportasi laut, perikanan dan kelautan, pariwisata serta pemukiman dengan kepadatan rendah sampai sedang.
- 3) Wilayah Pengembangan III mencakup, Wilayah Kec.Koto Tangah dengan luas 232,25 km² , pada kawasan budidaya diarahkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala local, pendidikan tinggi pemukiman dengan kepadatan rendah sedang.
- 4) Wilayah pengembangan IV mencakup: Kec.Kuranji dan Kec.Pauh dengan luas 230,70 km² , pada kawasan budidaya diarahkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala local, pendidikan tinggi pemukiman dengan kepadatan rendah sedang.
- 5) Wilayah Pengembangan V mencakup: Kec.Lubuk Kilangan dengan luas 85,99 km², kawasan dikembangkan untuk perdagangan dan jasa skala local, pertambangan, pemukiman dengan kepadatan rendah sedang.

- 6) Wilayah pengembangan VI mencakup : wilayah Kec.Bungus Teluk Kabung dengan luas 100,78 km², kawasan diarahkan untuk pengembangan transportasi laut, perikanan dan kelautan pariwisata perdagangan dan jasa local dan regional, industri dan pergudangan pemukiman dengan skala kepadatan rendah, kawasan lindung.

c. Rencana Pola Ruang Kota

Rencana Pola Ruang Kota Padang terdiri atas

1) Rencana kawasan lindung

Kawasan lindung di Kota Padang terdiri dari :

- a) Kawasan lindung yang memberikan perlindungan bagi kawasan dibawahnya.
- b) Kawasan perlindungan setempat
- c) Kawasan terbuka hijau
- d) Kawasan lindung cagar budaya
- e) Kawasan rawan bencana yang ditetapkan kawasan lindung

2) Rencana kawasan budidaya

Rencana kawasan budidaya di Kota Padang terdiri dari :

- a) Rencana pengembangan kawasan perumahan
- b) Rencana pengembangan kawasan Perdagangan dan jasa
- c) Rencana pengembangan kawasan Perkantoran Pemerintahan
- d) Rencana pengembangan kawasan industri dan perudangan
- e) Rencana pengembangan kawasan pusat olahraga dan rekreasi
- f) Rencana pengembangan kawasan pendidikan tinggi

- g) Rencana pengembangan kawasan pariwisata
 - h) Rencana pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan
 - i) Rencana pengembangan kawasan pertambangan
 - j) Rencana pengembangan kawasan militer
- 3) Rencana Pengembangan Kawasan Wisata

Pada pasal 83 Perda Kota Padang No.10 Tahun 2005 tentang RTRW Kota Padang dinyatakan bahwa tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata di kota Padang adalah menyediakan ruang untuk pengembangan kegiatan wisata yang meliputi wisata alam, wisata sejarah, wisata makanan, wisata belanja, wisata konvensi. Rencana pengembangan Kawasan Wisata alam di Kota Padang Meliputi :

- a) Kawasan Wisata alam Pasir Jambak di Kecamatan Koto Tengah.
- b) Kawasan Wisata Alam Gunung Padang di Kecamatan Padang Selatan
- c) Kawasan Wisata Alam Sungai Pisang di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- d) Kawasan wisata pantai sepanjang Pantai Padang.
- e) Kawasan Wisata Taman Wisata Alam Hutan Raya Bung Hatta.

Sedangkan rencana pengembangan kawasan wisata sejarah di Kota Padang meliputi :

- a) Kawasan cagar budaya kota lama Pondok dan Muaro Kec.Padang Selatan.

- b) Kawasan wisata sejarah di kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat
- c) Kawasan cagar budaya nagari adapt tradisional di Kec.Koto Tangah dan Kec.Bungus Teluk Kabung.

d.Arahan Pemanfaatan Ruang Kota

Arahan pemanfaatan ruang kota adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruanng serta kawasan strategis yang sudah direncanakan dalam RTRW Kota Padang. Arahan pemanfaatan ruang meliputi priorotas pemanfaatan ruang dan indikasi program utama yang meliputi :

- 1) Program perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota
- 2) Program perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kota
- 3) Program perwujudan Kawasan Strategis Kota

e. Program Perwujudan Kawasan Pariwisata

Program perwujudan kawasan pariwisata meliputi :

- 1) Pengembangan kawasan Pantai Padang sebagai kawasan Pariwisata dengan mengembangkan segmen-segmen ruang berdasarkan tema wisata yang akan dikembangkan, antara lain segmen wisata sejarah, wisata alam, wisata belanja, wisata kuliner, wisata dan lain sebagainya.
- 2) Pengembangan infrastruktur disepanjang pantai untuk mendukung pengembangan sector wisata tanpa mengurangi fungsi lindung pada daerah sempadan pantai.

- 3) Pengembangan kawasan hutan suaka alam Wisata Bung Hatta sebagai kawasan wisata ekologi.
- 4) Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa serta fasilitas lainnyayang mendukung pengembangan sector wisata, khususnya di WP I, WP II terkait dengan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang
- 5) Mengalokasi ruang untuk mendukung pengembangan kawasan wisata Sungai Pisang yang didukung dengan jaringan prasarana yang memadai.
- 6) Perencanaan rencana rinci dan perencanaan paduan rancang kota pada kawasan pariwisata sepanjang Pantai Padang .

Dari pembahasan Rencana Tata Ruang Tata Bangunan Kota Padang diatas mengenai sektor pariwisata, untuk lebih jelasnya dapat dilihat peta rencana tat ruang wilayah pariwisata Kota Padang pada lampiran.

2. Konsep Pariwisata

a. Definisi Pariwisata

Secara etimologis “pariwisata” berasal dari bahasa Sanskerta, yang terdiri dari dua suku kata yaitu “pari” dan “wisata”. Pari berarti banyak, berkali-kali atau berkeliling dan wisata berarti perjalanan atau bepergian. Menurut Bakaruddin (2008:25) istilah pariwisata pada umumnya sering digunakan dengan istilah pengunjung atau visitor. Visitor adalah setiap orang/kelompok orang yang datang ke suatu daerah atau negara lain dengan maksud apapun kecuali untuk menerima upah. Disamping itu Undang-undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan mengkonstruksikan pengertian wisata dan pariwisata dalam pasal 1 angka 1 dan 3 sebagai berikut:

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Menurut Lunberg dalam Kusmayadi (2000:4) pariwisata adalah konsep umum yang sejarahnya kembali ke masa lampau. Istilah kepariwisataan mencakup orang-orang yang melakukan perjalanan pergi dari rumahnya, dan perusahaan yang melayani mereka dengan cara memperlancar atau mempermudah perjalanan mereka, atau membuatnya lebih menyenangkan. Seorang wisatawan didefinisikan sebagai seseorang yang berada jauh dari tempat tinggalnya.

Menurut definisi yang lebih luas yang dikemukakan oleh H.Kodhyat dalam andy (2009), pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Sedangkan menurut pendapat dari Prof. K. Kraft dalam hadi (2009) mengemukakan batasan yang lebih bersifat teknis sebagai berikut : " kepariwisataan adalah keseluruhan dari pada gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman orang-orang, serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan pendiaman itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktifitas yang bersifat sementara itu.

Menurut Kusmayandi dalam Endar Sugiarto (2000:4), pariwisata dapat ditinjau dari berbagai aspek yang berbeda. Pariwisata dapat dilihat sebagai kegiatan melakukan perjalanan dari rumah dengan maksud tidak melakukan usaha atau bersantai. Pariwisata juga dapat dilihat sebagai suatu bisnis yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa bagi wisatawan dan menyangkut setiap pengeluaran oleh atau untuk wisatawan/pengunjung dalam perjalanan.

Sebagai suatu aktivitas, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dari pasar masyarakat maju dan sebegini kecil masyarakat negara berkembang. Pariwisata semakin berkembang sejalan dengan perubahan-perubahan sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan politik. Dari sisi

ekonomi, pariwisata muncul dari empat unsur pokok yang saling terkait erat atau menjalin hubungan dalam suatu sistem, yakni:

- 1) Permintaan atau kebutuhan.
- 2) Penawaran atau pemenuhan kebutuhan berwisata itu sendiri.
- 3) Pasar dan kelembagaan yang berperan untuk memfasilitasi keduanya.
- 4) Pelaku atau aktor yang menggerakkan ketiga elemen tadi.

Janiaton dan Helmut (2006:19-24), menyatakan pembangunan pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Orientasi pemanfaatan utama pesisir dan lautan serta berbagai elemen pendukung lingkungannya merupakan suatu bentuk perencanaan dan pengelolaan kawasan secara terpadu dalam usaha mengembangkan kawasan wisata. *Cultural* dan *Physical Aspect* merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi yang saling mendukung sebagai suatu kawasan wisata bahari. Suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil bila secara optimal didasarkan kepada empat aspek yaitu :

- 1) Mempertahankan kelestarian lingkungannya
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut
- 3) Menjamin kepuasan pengunjung
- 4) Meningkatkan keterpaduan dan kesatuan pembangunan masyarakat di sekitar kawasan.

b. Sarana Prasarana Pariwisata

Menurut Yoeti dalam Widya Oktavia (2009:10), sarana prasarana kepariwisataan sesungguhnya merupakan “tourist suplay” yang perlu dipersiapkan atau disediakan bila hendak mengembangkan pariwisata. Prasarana kepariwisataan pada hakekatnya sama dengan prasarana perekonomian karena kegiatan kepariwisataan pada dasarnya tidak lain adalah salah satu sector kegiatan perekonomian juga. Prasarana mencakup semua fasilitas penting seperti air, saluran air, jalan dan utilitas umum, pelayanan kepolisian dan fasilitas lain yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan dan kesejahteraan (Galion dan Eisner 1994 :128)

Menurut Peneliti PMB-LIPI dalam Waluya (2008:1), Sarana prasarana pariwisata yang lancar merupakan salah satu indikator perkembangan pariwisata. Sarana/prasarana diartikan sebagai proses tanpa hambatan dari pengadaan dan peningkatan tempat hiburan, restoran, dan sebagainya serta prasarana jalan dan transportasi yang lancar dan terjangkau oleh wisatawan. Adapun sarana prasarana yang dimaksud tersebut adalah :

1) Prasarana Kepariwisataan,

Menurut Lothar A.Kreck dalam Waluya (2008:1), prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan

sebagainya. Prasarana kepariwisataan yang dimaksud oleh Lothar A.Kreck tersebut adalah :

- a) Pengangkutan (transportation), pengangkutan disini adalah pengangkutan yang dapat membawa para wisatawan dari Negara/daerah dimana ia biasa tinggal ke daerah tujuan wisata
- b) Komunikasi, Tersedianya prasarana komunikasi akan dapat mendorong para wisatawan untuk mengadakan perjalanan jarak jauh, dengan demikian wisatawan tidak ragu-ragu meninggalkan rumah. Termasuk dalam kelompok ini diantaranya telepon, telegraph, radio, internet.
- c) Kelompok yang termasuk UTILITIES, yaitu penerangan listrik, persediaan air minum, dan sumber energi.
- d) Pelayanan Kesehatan, harus ada jaminan bahwa di daerah tujuan wisata tersedia pelayanan bagi suatu penyakit yang mungkin akan di derita dalam suatu perjalanan
- e) Faktor keamanan, perasaan tidak aman dapat terjadi disuatu tempat yang baru saja dikunjungi. Adanya perlakuan yang tidak wajar dari penduduk setempat .
- f) Petugas yang langsung melayani wisatawan, termasuk petugas disini adalah polisi dan pejabat-pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelayanan para wisatawan.

2) Sarana Kepariwisataaan

Sarana Kepariwisataaan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar prasarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang, serta dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam. Sarana kepariwisataan merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sarana wisata secara kuantitatif menunjukkan kepada jumlah sarana wisata yang harus disediakan sedangkan secara kualitatif menunjukkan kepada mutu pelayanan yang diberikan dan tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan. Suwantoro dalam waluya (2008:4)

Sarana Pariwisata dibagi atas :

- a) Sarana pokok kepariwisataan, perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata termasuk kedalam kelompok ini adalah travel agent, perusahaan angkutan wisata, hotel, rumah makan, objek wisata, dan aktraksi wisata lainnya.
- b) Sarana pelengkap kepariwisataan, yaitu perusahaan-perusahaan atas tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok kepariwisataan

Menurut Lothar A.Kreck dalam Waluya (2008:6), berdasarkan sarana prasarana yang telah diungkapkan diatas maka terdapat beberapa kriteria kelayakan wilayah menjadi suatu objek wisata.

Tabel II.1

Kelayakan Wilayah Menjadi Suatu Objek Wisata

Kriteria	Standar Minimal
Objek	Terdapat salah satu unsur, alam,budaya ataupun social
akses	Adanya jalan, kemudahan rute ,tempat parkir dan harga parkir yg terjangkau
Akomodasi	Adanya pelayanan penginapan (hotel, wisma, losmen)
Fasilitas	Agen perjalanan, pusat informasi, salon, fasilitas kesehatan, TIC (Tourist Information Center), guiding (pemandu wisata), plang informasi, petugas pariwisata dan lainnya
Transportasi	Adanya transportasi menuju kawasan wisata pantai
Catering Service	Adanya pelayanan makanan dan minuman
Aktifitas rekreasi	Terdapat sesuatu yang dilakukan di lokasi wisata seperti berenang, surfing, terjun payung, berjemur

	dan lainnya
Komunikasi	Adanya sarana telekomunikasi seperti signal hp yang baik, jaringan radio dan lainnya
Sistem perbankan	Adanya beberapa Bank maupun ATM beberapa bank
Kesehatan	Poliklinik umum/adanya jaminan ketersediaan pelayanan yang baik bagi wisatawan
Keamanan	Adanya jaminan keamanan seperti petugas khusus, polisi pariwisata, rambu-rambu pantai, penjaga pantai dll
Kebersihan	Tempat sampah dan rambu-rambu kebersihan
Kesehatan	Poliklinik umum, jaminan ketersediaan pelayanan kesehatan yang baik bagi wisatawan
Sarana Ibadah	Terdapat salah satu sarana ibadah bagi wisatawan
Sarana pendidikan	Terdapat salah satu sarana pendidikan formal
Sarana olahraga	Terdapat sarana olahraga lengkap

3. Konsep Partisipasi

a. Definisi Partisipasi

Ditinjau dari etimologi nya kata partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu “participacio” yang terdiri dari dua suku kata yakni para yang artinya bagian dan cepere yang artinya mengambil. Participacio artinya mengambil bagian atau ikut serta, dimana pengertian ini mengandung pengertian aktif yakni kegiatan/aktifitas. Menurut Rusidi dalam Asep Mulyadi : (2009) , partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan kepentingan umum dengan cara menyumbangkan pikiran, ide, materi dan tenaga. Menurut *Ach. Wazir Ws.*, et al dalam Saca Firmansyah (2009) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.

Disamping itu Partisipasi masyarakat menurut Isbandi dalam Saca Firmansyah (2009) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan pembangunan adalah sudah menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah kecamatan dalam usahanya untuk memperbaiki keadaan wilayahnya. Agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil, maka salah satu syarat pokok adalah tersedianya dana / biaya yang tidak hanya berasal dari bantuan pemerintah, tetapi juga dari kesedian masyarakat untuk memberikan bantuannya baik dalam bentuk uang, material tenaga maupun pikiran.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sangat penting untuk di wujudkan, terlebih lagi jika dihubungkan dengan kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan di segala bidang oleh pemerintah. Dimana tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah menyangkut kehidupan dan kepentingan dari orang banyak demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera baik material maupun spritual.

Hetifah Sj. Soemarto dalam Turindra (2003) mengartikan partisipasi sebagai proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Pelaksanaan konsep partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan dan hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi selama ini masih banyak yang memandang peran

serta yang dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat semata-mata sebagai penyampaian informasi, penyuluhan bahkan sebagai alat *Public Relation* (PR) agar suatu kegiatan/proyek dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi oleh aparat pemerintah Kota Padang adalah mengatasi permasalahan kebersihan lingkungan khususnya di kawasan pantai Purus Kota Padang, terbentur dengan keterbatasan dana yang tersedia, maka partisipasi para pedagang yang menggunakan lokasi tersebut sebagai tempat mencari nafkah sangat menentukan didalam keberhasilan program dibidang kebersihan lingkungan ini.

b. Bentuk-bentuk Partisipasi

Menurut Suwanto dalam Mulyadi (2009:5), bentuk-bentuk partisipasi itu terdiri dari :

- 1) Partisipasi Aktif, dilaksanakan secara langsung baik perorangan maupun secara bersama-sama, yang secara sadar ikut membantu program pemerintah dengan inisiatif dan kreasi mau melibatkan diri dalam kegiatan atau melalui rasa ikut memiliki dalam kalangan masyarakat
- 2) Partisipasi Pasif, yaitu timbulnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu atau

merusak lingkungan alam. Dalam peran pasif masyarakat cenderung sekedar melaksanakan perintah dan mendukung terpeliharanya konservasi sumber daya alam.

4. Sapta pesona

Berdasarkan Panduan Pelaksanaan Sadar Wisata Oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dalam Chaniago (2010), Sadar Wisata dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu wilayah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sapta Pesona merupakan jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui perwujudan tujuh unsur dalam Sapta Pesona tersebut.

Berdasarkan panduan Logo Sapta Pesona berbentuk matahari tersenyum yang menggambarkan semangat hidup dan kegembiraan. Tujuh sudut pancaran sinar yang tersusun rapi di sekeliling matahari menggambarkan unsur-unsur Sapta Pesona yang terdiri dari : unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan .

a. Keamanan, menciptakan lingkungan yang aman bagi wisatawan dan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan, sehingga wisatawan tidak merasa cemas dan terhindar dari :

- 1) Tindak kejahatan, kekerasan, ancaman seperti kecopetan, pemerasan, penodongan dan penipuan.
- 2) Terserang dari berbagai penyakit berbahaya
- 3) Kecelakaan yang disebabkan oleh alat perlengkapan dan fasilitas yang kurang baik
- 4) Gangguan oleh masyarakat seperti pemaksaan dari pedagang asongan , tangan jahil, ucapan dan tindakan serta perilaku yang tidak bersahabat.

Bentuk keamanan pelaksanaan keamanan tersebut diantaranya:

- a) Tidak mengganggu wisatawan
 - b) Menolong dan melindungi wisatawan
 - c) Bersahabat terhadap wisatawan
 - d) Memelihara keamanan lingkungan
 - e) Membantu memberi informasi kepada wisatawan
 - f) Menjaga lingkungan yang bebas dari bahaya penyakit
 - g) Meminimalkan resiko kecelakaan dalam penggunaan fasilitas public.
- b. Ketertiban, menciptakan lingkungan yang tertib bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu memberikan layanan teratur dan efektif bagi wisatawan

Bentuk ketertiban :

- 1) Mewujudkan budaya antri
- 2) Memelihara lingkungan dengan mentaati peraturan yang berlaku
- 3) Disiplin waktu/tepat waktu
- 4) Serba teratur, rapi dan lancer
- 5) Semua sisi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat menunjukkan keteraturan yang tinggi.

c. Kebersihan, suatu kondisi lingkungan serta kualitas produk dan pelayanan di destinasi pariwisata/daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang sehat/higienik sehingga memberikan rasa nyaman dan senang bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.

Bentuk aksi yang perlu diwujudkan antara lain :

- 1) Tidak membuang sampah sembarangan
- 2) Menjaga kebersihan lingkungan objek wisata
- 3) Menjaga lingkungan yang bebas dari polusi udara
- 4) Menyiapkan sajian makanan dan minuman yang higienis
- 5) Menyiapkan perlengkapan penyajian makanan dan minuman yang bersih
- 6) Pakaian dan penampilan petugas bersih dan rapi.

d. Kesejukan, Suatu kondisi di destinasi pariwisata/daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang sejuk dan teduh yang akan

memberikan perasaan nyaman bagi wisatawan dalam melakukan kunjungannya ke daerah tersebut Bentuk aksi yang perlu diwujudkan antara lain :

- 1) Melaksanakan penghijauan dengan menanam pohon
- 2) Memelihara penghijauan di lingkungan objek wisata
- 3) Menjaga kondisi sejuk dalam berbagai area di daerah tujuan wisata

e. Keindahan, Suatu kondisi di daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang indah dan menarik dan memberikan kesan yang mendalam bagi wisatawan sehingga mewujudkan potensi kunjungan ulang serta mendorong promosi ke pasar wisatawan yang lebih luas

Bentuk Aksi yang perlu diwujudkan antara lain :

Bentuk Aksi yang perlu diwujudkan

- 1) Menjaga objek wisata dalam tatanan yang estetik, alami dan harmoni.
- 2) Menata lingkungan secara teratur
- 3) Menjaga keindahan vegetasi, tanaman hias dan peneduh.
- 4) Menjaga keindahan vegetasi, tanaman hias dan peneduh

f. Keramahan, Suatu kondisi lingkungan yang bersumber dari sikap masyarakat di destinasi pariwisata yang mencerminkan suasana yang akrab dan terbuka.

- 1) Bersikap sebagai tuan rumah yang baik serta selalu membantu wisatawan
- 2) Memberi informasi tentang adat istiadat secara sopan
- 3) Menunjukkan sikap menghargai dan toleransi terhadap wisatawan

4) Memberikan senyum yang tulus.

g. Kenangan, Suatu bentuk pengalaman yang berkesan di destinasi pariwisata yang akan memberikan rasa senang dan kenangan yang indah bagi wisatawan

Bentuk aksi yang perlu diwujudkan :

- 1) Menggali dan mengangkat keunikan budaya local
- 2) Menyajikan makanan dan minuman khas lokal yang bersih dan sehat
- 3) Menyediakan cinderamata yang menarik, unik/khas serta mudah dibawa.

5. Konsep Kebersihan lingkungan

Menurut Cakrawala (2005:6), Pengelolaan didefinisikan sebagai suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan (sementara), pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, perlindungan alam (*conservation*) keindahan dan pertimbangan-pertimbangan lingkungan lainnya dan juga mempertimbangkan sikap masyarakat

Kebersihan Lingkungan adalah suatu bentuk keadaan yang bersih, rapi, disiplin aman dan teduh yang terdapat di sekitar manusia baik berupa benda mati maupun organisme hidup yang mempengaruhi bentuk kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pramudya (2001:36),

6. Pendekatan Top down dan Bottom up

Kartasasmita (2009:21) Pendekatan top down, sebuah konsep pembangunan mendesak masyarakat bekerja sesuai kemauan atasan/pemerintah di dalam perencanaan tanpa mempedulikan situasi nyata masyarakat. Kriteria dari pendekatan ini adalah ;

- a. Masyarakat sebagai penerima manfaat hanya dianggap sebagai obyek yang tidak tahu apa-apa, sehingga tidak dapat mengeluarkan pendapat dan aspirasinya mengenai program tersebut.
- b. Program yang dilaksanakan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Solusi permasalahan hanya didasarkan pada hasil pemikiran sekelompok orang penentu kebijakan dan bukan berdasarkan preferensi dan jawaban masyarakat atas kebutuhan riil mereka
- d. Terjadi marginalisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat menjadi tidak aktif, kreatif dan semakin terbelakang

Sedangkan pendekatan Bottom up menurut Kartasasmita (2009:23), adalah sebuah konsep pembangunan yang mengedepankan masyarakat sebagai pemeran utama dalam proses pembangunan pada setiap tahap, tercakup di dalamnya proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

- a. Masyarakat sebagai pemeran utama dalam perencanaan pembangunan sehingga aspirasi masyarakat dapat ditampung dalam suatu program pembangunan.
- b. Program dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Masyarakat jauh lebih aktif dan kreatif serta berpikiran maju .

B. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, diperlukan kerangka konseptual penelitian. Dalam penelitian tentang Peruntukan Wilayah Kawasan wisata Pantai Purus Kota padang, kerangka konseptual yang akan di pedomani dapat dilihat pada bagan/gambar dibawah ini

Gambar II.1.Kerangka Konseptual Penelitian Tentang Peruntukan Wilayah Kawasan Pantai Purus Kota Padang

Berdasarkan gambar/bagan kerangka konseptual diatas dapat dipahami bahwa penelitian ini berusaha untuk mengetahui peruntukan wilayah kawasan wisata Pantai Purus Pota Padang. Hal-hal yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kelengkapan sarana prasarana kepariwisataan di objek wisata Pantai Purus, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan di kawasan Pantai Purus, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban di kawasan Pantai Purus.

disepakati dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, namun adanya Forum Komunikasi Pedagang Pantai Purus Baru yaitu suatu komunitas pedagang di Pantai Purus masalah ketertiban mulai bisa diatasi. Dalam hal pengelolaan kebersihan, peran pedagang Pantai Purus masihlah sangat kurang hal terlihat masih adanya sampah-sampah yang berserakan disekitar Pantai Purus, namun pengelolaan kebersihan kios pedagang telah dilakukan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di kawasan wisata Pantai Purus Kota Padang dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sebagai suatu kawasan wisata, Pantai Purus masih banyak memiliki kekurangan terutama dalam hal sarana prasarana seperti belum tertatanya dengan baik pedagang yang berjualan, belum tersedianya fasilitas parkir yang baik, belum adanya petugas jaga atau penjaga pantai, belum adanya petugas pemandu wisata, belum adanya pelaksanaan atraksi wisata yang

terencana, tidak tersedianya layanan penginapan ataupun hotel, dan tidak adanya system perbankan sekitar pantai seperti ATM untuk transaksi keuangan para wisatawan, serta sarana ibadah yang masih menggunakan mesjid milik warga.

2. Dalam pengelolaan kawasan wisata oleh masyarakat sekitar terlihat:
 - a. Pantai Purus masih belum terjaga kerbersihannya, disekitar pantai masih banyak tumpukan sampah-sampah yang ditemukan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan pantai masih dalam bentuk partisipasi yang bersifat pasif. Pedagang cenderung hanya membersihkan sampah diwilayah tempat mereka berdagang saja, sedangkan di wilayah bibir pantai dibiarkan dipenuhi oleh sampah-sampah bawaan dari laut.
 - b. Dari segi keamanannya di kawasan wisata Pantai Purus sudah dapat terjaga dengan baik, Forum Komunikasi Pedagang Pantai Purus Baru (FKPPPB) sebagai organisasi pedagang memberikan kontribusi yang maksimal dalam penjagaan keamanan pantai, FKPPPB melakukan penjagaan keamanan di kawasan Pantai Purus dengan memaksimalkan partisipasi masyarakat Purus yaitu dengan cara penjagaan keamanan dilakukan secara bergilir oleh pemuda-pemuda warga purus lima.
 - c. Pelaksanaan ketertiban di kawasan Pantai Purus masih sangat rendah, pedagang masih banyak melanggar peraturan-peraturan untuk berdagang yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Padang, misalnya mengenai pelarangan menggunakan payung ketika malam hari pedagang masih banyak menggunakan payung di malam hari bahkan ada beberapa pedagang yang menggunakan payung yang sangat rendah sehingga bisa menjadi ajang perbuatan tidak senonoh oleh masyarakat, pelanggaran terhadap batas waktu berdagang yang tidak boleh terlalu larut malam.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk kemajuan Pantai Purus sebagai suatu kawasan wisata

1. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pantai Purus, hendaknya pemerintah melengkapi kekurangan sarana prasarana yang terdapat di Pantai Purus.
2. Untuk meningkatkan kebersihan di Pantai Purus hendaknya pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang menyediakan bak sampah untuk masing-masing pedagang, serta mensosialisasikan program-program kebersihan secara berkala sehingga pedagang menjadi terbiasa untuk menjaga kebersihan pantai.
3. Untuk lebih meningkatkan keamanan di kawasan Pantai Purus hendaknya pemerintah menyediakan Pos jaga serta petugas jaga, di kawasan Pantai Purus.

4. Dalam meningkatkan ketertiban pedagang Pantai Purus harusnya pemerintah memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pedagang yang melanggar aturan-aturan.